

PENTINGNYA IMPLEMENTASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAHAN

Putri Ariella Belinda, Nevi Costari

[Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tulungagung]

Abstract

Government agencies are all government institutions with the function to carry out the duties or functions of government administration in the operating environment ranging from those at the center to those in the regions, including commissions, agencies, and councils that receive funds from the APBN or APBD. Demands for public transparency, which requires a system in order to create maximum performance, both good and also accountability so as to be able to realize a government that is free from fraud that is detrimental to the state. Public sector accounting is an accounting system used by government agencies or public service institutions as a way or tool for accountability to the general public. The purpose of this study is to find and determine the importance of implementing Public Sector Accounting in a government agency. This study used descriptive qualitative method. The results of this study indicate that every government agency must implement public sector accounting because it can simplify and improve the quality of financial reporting..

Keywords: *public sector accounting , implementation , a government agency*

Abstrak

Instansi Pemerintah merupakan semua lembaga pemerintah dengan memiliki fungsi untuk menjalankan tugas atau fungsi dari administrasi pemerintahan yang ada di lingkungan operasi mulai dari yang berada di pusat sampai maupun yang berada di daerah, dengan termasuk meliputi komisi, badan, dan dewan yang memperoleh dana dari APBN atau APBD. Tuntutan transparansi publik, yang membutuhkan suatu sistem agar dapat menciptakan kinerja yang maksimal, baik dan juga akuntabilitas sampai mampu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari tindak kecurangan yang merugikan negara. Akuntansi sektor publik merupakan sebuah sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi Lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga layanan publik untuk sebagai sebuah cara atau alat untuk suatu pertanggungjawaban kepada masyarakat umum. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan dan mengetahui pentingnya implementasi Akuntansi Sektor Publik di dalam suatu instansi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap instansi pemerintah harus menerapkan akuntansi sektor publik karena dapat mempermudah dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Kata kunci: *akuntansi sektor publik, implementasi , instansi pemerintahan*

PENDAHULUAN

Implementasi adalah sebuah penerapan dari suatu persiapan yang telah dirancang dengan siap dan matang selain itu juga dengan secara mendalam. Implementasi juga biasanya dilakukan setelah suatu perencanaan sudah ditafsir dengan baik dan dengan mencari yang terbaik. Dan supaya sebuah rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan sempurna maka tentunya perlu unsur-unsur pendukung lain dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya, misi yang ada pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD)1945, yang mana di dalam misi itu merupakan suatu dasar dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah didalam kepentingan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang berada di pusat maupun yang berada di daerah. Instansi-instansi merupakan suatu alat yang bertujuan melaksanakan tugas yang dibentuk oleh pemerintah dan berfungsi untuk menangani urusan-urusan pemerintahan, selain itu instansi merupakan salah satu cara penentuan untuk terlaksananya sebuah misi atau rencana dengan sempurna agar cita-cita dari sebuah negara dapat tercapai dan terwujud dengan baik. Hasil yang dicapai oleh kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintahan sesuai dengan wilayah yang dipercayakan pemerintah dapat diinformasikan melalui informasi pertanggungjawaban kinerja setiap instansi yang ada pemerintahan. Pemerintah membutuhkan informasi mengenai akuntabilitas kinerja sebuah instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan, berdasarkan informasi tersebut, pemerintah memiliki bahan atau dasar untuk mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan administrasi untuk lebih menyeimbangkan pengelolaan operasi atau kepentingan pemerintah.

Akuntansi sektor publik dalam evolusinya, yang dideskripsikan sebagai sebuah akuntansi dana publik, yang merupakan sebuah cara dari akuntansi dan mekanisme pengkajian yang ditentukan pada penyelenggaraan dana publik. Dana masyarakat diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat, bukan oleh perorangan. Dana ini biasanya datur atau dilaksanakan oleh sebuah organisasi sektor publik ataupun hubungan sektor public swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik bisa diartikan sebagai suatu cara akuntansi dan mekanisme analisis untuk penyelenggaraan dana publik di organisasi dpemerintah pusat, di lembaga tinggi negara dan departemen, di lembaga pelayanan publik, di organisasi pemerintah daerah, badan layanan publik yang berada di daerah, dan juga selain itu masyarakat. organisasi sosial dan lembaga sosial. lembaga, serta dalam proyek perencanaan kolaboratif antara organisasi sektor publik dan swasta. Di dalam suatu akuntansi sektor publik, data yang digunakan adalah data akuntansi dan bertujuan untuk memberikan informasi tentang keadaan ekonomi dan keadaan keuangan di dalam suatu sektor publik tersebut kepada eksekutif, kepada legislatif, dan yudikatif serta selain itu juga kepada

masyarakat umum. Selanjutnya, akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana pelaporan kepada publik. Semakin banyak perhatian sekarang diberikan pada praktik akuntansi lembaga publik, baik akuntan sektor publik atau LSM publik. Badan akreditasi dituntut oleh masyarakat untuk dapat dilaksanakan secara transparan dan juga akuntabel. Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada akhirnya akan memberikan kerangka kerja untuk berfungsinya tahapan siklus akuntansi Sektor Publik. Siklus mana yang meliputi semua urutan cara mulai dari sebuah persiapan, perkiraan, penerapan anggaran, penyediaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan akuntabilitas publik. Standar akuntansi yang dipakai di Indonesia adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Semua standar ini adalah referensi yang disetujui dan ditentukan oleh badan yang berhak di bidang yang sesuai. (GUNAWAN, 2015)¹

Instansi pemerintah sebagai dimengerti sebagai segala sesuatu atau semua yang tercantum dalam instansi pemerintah yang berfungsi melaksanakan tugas atau manfaat penyelenggaraan pemerintahan baik di dalam atau sekitar lingkungan pelaksana pusat maupun daerah, termasuk komisi dan komisi, panitia, dewan, dan lembaga yang menerima dana dari APBN/APBD. Memerlukan publisitas yang terbuka, berfungsi dengan baik dan akuntabel agar pemerintahan yang bebas dari kecurangan-kecurangan yang merugikan negara dan masyarakat dengan (kejujuran, keterbukaan, transparansi) dapat tercapai, transparan dan akuntabel) atau akuntabel kepada masyarakat. Persyaratan transparansi ini seringkali ditujukan kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem keuangan publik dalam kerangka negara kesatuan, meliputi distribusi dana antara pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah serta juga penyebaran atau meratakan antara bidang profesional, demokrasi, keadilan dan transparansi. Dan Tentunya memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan yang di butuhkan daerah tersebut. Sesuai dengan kewajiban dan pembagian wewenang serta tata cara pelaksanaan wewenang tersebut, termasuk pengelolaan pengawasan keuangan.

Pemerintah daerah berfungsi sebagai daerah otonom yang tentunya memiliki kebijakan dtersendiri dalam penyelenggaraan keuangan didaerahnya. Namun, tentunya harus tetap bersumber pada perundang-undangan dan juga peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang ada. Pemerintah di suatu daerah didalam penyelenggaraan keuangannya bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang dan pihak-pihak yang terkait dalam urusan keuangan daerah bertujuan

1

untuk bertanggungjawab melaksanakan sebuah pemeriksaan internal maupun pemeriksaan eksternal terhadap pelaksanaan keuangan yang ada di daerah. Pemeriksaan internal pelaksanaan keuangan yang ada di daerah selain mengawasi urusan kas atau uang, juga mengawasi penerapan rencana, kegiatan dan pengelolaan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah melalui efektifitas dan efektivitasnya yang selanjutnya dapat mempengaruhi kesehatan dan kinerja keuangan daerah. Seperti yang ditunjukkan dalam perhitungan 4 Laporan Pencapaian Keuangan untuk menentukan tingkat dan efektivitas daerah dalam mencapai program daerah. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh otoritas di bidangnya untuk laporan pelaksanaan anggaran yang transparan dan akurat. Tinjauan ini bertujuan untuk memahami pentingnya penerapan akuntansi sektor publik di instansi pemerintah.

KAJIAN TEORI

A. Akuntansi Sektor Publik

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana pelaporan kepada publik. Saat ini, semakin banyak perhatian diberikan pada praktik akuntansi lembaga publik, baik akuntan sektor publik atau LSM publik. Lembaga publik sangat didesak oleh masyarakat untuk memerintah secara transparan dan akuntabel.

Akuntansi sektor publik adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan oleh instansi pemerintah daerah untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi yang menguntungkan semua pihak di luar.

Akuntansi sektor publik adalah teknik akuntansi dan mekanisme analisis yang nantinya akan diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga negara tingkat atas dan bawah, termasuk pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga pemerintah, industri publik, organisasi perusahaan, LSM dan sipil organisasi masyarakat, serta melamar proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian dan analisis, serta menghasilkan laporan keuangan dalam suatu bisnis/badan/organisasi, baik swasta maupun publik, berikut yang akan digunakan untuk menyediakan informasi keuangan dan menasihat mereka yang membutuhkan. untuk membuat keputusan.

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Ruang lingkup akuntansi sektor publik mencakup semua instansi pemerintah dan organisasi nirlaba. Akuntansi sektor publik juga memiliki hubungan yang sangat erat

dengan penerapan dan perlakuan akuntansi sektor publik. Sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dan kompleks daripada sektor swasta yang lebih sempit. Perluasan ruang lingkup sektor publik tidak semata-mata disebabkan oleh keragaman dan bentuk organisasi di dalamnya, atau dipengaruhi oleh lingkungan kompleks yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, sektor publik meliputi instansi pemerintah, pemerintah pusat dan daerah serta satuan kerja pemerintah, perusahaan publik, baik BUMN maupun BUMD, organisasi dan lembaga, organisasi politik dan massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dinas kesehatan, perguruan tinggi dan organisasi nirlaba lainnya. Bahkan, beberapa tugas dan fungsi sektor publik juga dapat dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas menghasilkan beberapa jenis layanan publik, seperti layanan telekomunikasi, pemungutan pajak, pendidikan, transportasi umum, dll. Namun untuk beberapa tugas, keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintah. Dengan demikian, akuntansi sektor publik berbeda dari akuntansi sektor swasta dalam beberapa hal.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Relevan

Laporan keuangan untuk akuntansi sektor publik harus konsisten. Relevansi berarti mengandung informasi yang bisa mendorong pengambilan sebuah keputusan dan juga evaluasi terhadap sebuah peristiwa pada masa lalu dan juga pada masa depan.

Handal

Laporan keuangan akuntansi sektor publik berisi informasi yang berguna untuk dipertimbangkan bersama dengan laporan keuangan sebelumnya.

Mudah Dipahami

Akuntansi dan laporan keuangan sektor publik mempunyai fitur informasi yang bisa dengan mudah dapat dipahami oleh semua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk manajemen kegiatan yang benar, efisien dan ekonomis serta distribusi sumber daya yang diandalkan kepada organisasi, untuk dapat memberikan informasi kepada publik, memungkinkan manajer untuk mempertanggungjawabkan kinerja, melaksanakan tanggung jawab mereka secara tepat, dan secara efektif mengelola program dan penggunaan sumber daya sesuai dengan kewenangannya dan memungkinkan pegawai

pemerintah untuk melaporkan secara terbuka kinerja pemerintah dan penggunaan dana publik.

Pencatatan Akuntansi Sektor Publik

Ada beberapa metode atau cara untuk pencatatan akuntansi yang umum dilakukan di dalam akuntansi sektor publik, yaitu :

Akuntansi anggaran (budgetary accounting)

Akuntansi anggaran adalah sebuah pendataan akuntansi distribusi sebuah anggaran dan pentafsiran sebuah pendapatan dalam rangka penerapan dari APBN dan juga APBD. Tujuan utama dari akuntansi anggaran adalah pengawasan suatu anggaran. Akuntansi anggaran memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengawasan dan peninjauan anggaran sehingga nantinya dapat diketahui pelaksanaan penyerapan anggaran, keekonomian, efisiensi dan efektivitas anggaran serta keadaan keuangan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah.

Akuntansi kas (cash accounting)

Akuntansi kas merupakan cara atau prosedur akuntansi tertua dalam sebuah sejarah akuntansi yang dilakukan dengan dberabad-abad, bahkan sampai ribuan tahun yang lalu. Sampai saat ini, akuntansi kas masih banyak dipakai di sektor publik dan di pakai pada organisasi nirlaba. Akuntansi kas mencatat transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dan pembayaran serta saldo kas pada buku kas.

Akuntansi akrual (accrual accounting)

Akuntansi akrual adalah metode pendataan, atau penulisan akuntansi yang banyak dipakai dan dimanfaatkan dalam suatu organisasi bisnis. Akan tetapi, sekarang sektor publik dan organisasi nirlaba juga didorong untuk memakai akuntansi akrual. Tujuan penerapan akuntansi akrual di dalam sektor publik secara fundamental berbeda denganyang ada di dalam sektor bisnis. Penerapan akuntansi akrual di sektor publik berguna dalam menetapkan biaya jasa dan menetapkan harga atau tarif jasa.

Akuntansi komitmen (commitment accounting)

Akuntansi komitmen berfungsi untuk mencatat atau mendata semua transaksi lebih awal dari akuntansi akrual dan kas. Suatu usaha diakui setelah ketika sebuah pesanan yang telah dikeluarkan untuk membeli barang atau jasa, disaat kontrak kerja dibuat, Ketika dana dibutuhkan untuk memenuhi obligasi jangka panjang.

Akuntansi dana (fund accounting).

Pemakaian atau penerapan sebuah akuntansi dana dalam akuntansi pemerintahan yang ada di Indonesia dimungkinkan karena di dalam suatu sistem penganggaran dana pemerintah diperoleh beberapa program khusus yang membutuhkan akuntansi dana program, sehingga sumber dan penggunaan dana serta perimbangan dana program harus ditetapkan secara terpisah. Akuntansi dana adalah metode akuntansi yang memisahkan sumber daya ke dalam berbagai jenis dana untuk menentukan sumber dan penggunaan dana. Tujuan akuntansi dana adalah untuk mengelola dan bertanggung jawab atas dana tersebut, menentukan posisi keuangannya, merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerjanya.

B. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah rencana dianggap sempurna. Secara etimologis, konsep implementasi menurut kamus Webster adalah Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu implement. Dalam Kamus Besar Webster, implementasi berarti menyediakan sarana untuk mencapai (providing a means of achievement something) dan memberikan efek praktis (have a impact/image) mempengaruhi sesuatu). untuk melakukan segala cara untuk melakukan pengaplikasiannya. pelaksanaan adalah penyediaan sarana untuk mencapai sesuatu yang memiliki dampak atau efek pada sesuatu. Sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan akibat yang dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh instansi pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, pemerintah atau kelompok swasta untuk menciptakan tujuan yang diidentifikasi dalam keputusan politik. Selanjutnya, definisi kinerja sesuai dengan tindakan yang diambil oleh otoritas dan pihak yang berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi mengacu pada berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan program yang telah disusun untuk mencapai tujuan dari program yang direncanakan, karena pada dasarnya semua rencana yang telah dilaksanakan diidentifikasi memiliki tujuan atau target yang ingin dicapai.(Chandra, 2019)²

Pelaksanaan ini berlangsung setelah melalui tahapan-tahapan tertentu seperti pengesahan peraturan perundang-undangan, setelah itu keluarannya bersifat politis berupa keputusan pelaksanaan dan sebagainya. sampai kebijakan diperbaiki. Implementasi juga

dapat dilihat sebagai tindakan atau pelaksanaan rencana yang disiapkan dengan cermat dan terperinci. Pelaksanaan biasanya dilakukan setelah jadwal dianggap tetap.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi adalah:

Faktor komunikasi (Communication)

Komunikasi adalah proses sebuah penyampaian informasi dari seorang komunikator kepada seorang komunikan. Sedangkan komunikasi sebuah ketentuan prosedur yang berarti proses pemberian informasi prosedur dari pembuat pembuat ketentuan kepada penyelenggara dari sebuah prosedur tersebut.

Sumber daya (Resources)

Sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan, yang berarti tidak peduli seberapa jelas dan konsisten syarat dan aturan atau tidak peduli penyampaian ketentuan atau sebuah peraturan mengenai seberapa tepat, jika penyelenggara prosedur ketentuan yang bertanggung jawab implementasi prosedur ketentuan tidak memiliki sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif, pelaksanaan kebijakan tidak akan menjadi efektif dan lebih baik.

Disposisi (Disposition)

Disposisi atau karakteristik perilaku para penegak kebijakan memainkan peran penting dalam membuat kebijakan konsisten dengan tujuan atau sasaran. Karakteristik penting bagi penegak pelaksanaan prosedur adalah tingkat kejujuran dan sebuah komitmen yang memang sangat tinggi.

Struktur birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan. Aspek struktur organisasi ini terdiri dari dua hal, yaitu mekanisme dan juga struktur suatu birokrasi. Aspek pertama yaitu mekanisme, selama pelaksanaan penentuan prosedur, standar operasional prosedur (SOP) secara umum telah dikembangkan. SOP merupakan pedoman bagi seluruh pelaksana dalam mengambil tindakan agar pelaksanaan prosedur tidak menyimpang dari maksud dan tujuan prosedur. Aspek kedua yaitu struktur birokrasi, struktur birokrasi yang berlebih atau panjang dan terfragmentasi nantinya akan cenderung melonggarkan kapasitas dari sebuah pemeriksaan dan menyebabkan tata cara birokrasi yang bertele-tele, yang sehingga membuat operasional organisasi menjadi kaku.

C. Instansi pemerintah

Badan merupakan suatu bentuk atau organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan adalah suatu bentuk atau organisasi yang tersusun meliputi dari dua jenis yaitu pemerintah dan juga swasta. Meski mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, keduanya memiliki tanggung jawab yang berbeda. Instansi pemerintah nirlaba. Dana yang dipakai oleh instansi pemerintah yang berasal dari hasil pajak, selain itu juga retribusi atau subsidi. Selanjutnya lembaga pemerintah ini akan bertanggung jawab kepada lembaga legislatif dan juga kepada publik.

Transparansi pendanaan kepada seluruh masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab yang dimiliki oleh instansi pemerintah kepada masyarakat mengenai penggunaan pajak yang dipakai untuk menyelenggarakan operasional yang dijalankan oleh instansi pemerintah. Dengan ini tentunya berbeda dengan perusahaan swasta. Contoh instansi pemerintah adalah kejaksaan agung, komisi kehakiman (KY), badan pemeriksa keuangan (BPK), badan meteorologi, klimatologi dan geofisika (BMKG), dan badan penyelidikan nasional tenaga nuklir nasional (BATAN). Bentuk instansi pemerintah ini selanjutnya akan dibagi lagi menjadi dua yaitu instansi pemerintah yang berada di pusat dan instansi pemerintah yang berada di daerah.

Institusi eksklusif atau swasta bertujuan untuk mencari keuntungan. Sumber pendanaan awal yang dipakai juga terpisah dengan pemerintah, yang bersumber dari milik seorang pribadi, pinjaman ataupun juga melalui saham. Badan swasta umumnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada penjabat atau pemilik saham atau seorang CEO, dan pendanaan dana mereka lebih privasi untuk kalayak umum. Seperti contohnya yaitu sebuah organisasi swasta tersebut antara lain PT Astra International, dengan PT HM Sampoerna, selain itu PT Indofood Sukses Makmur dan juga Bank Central Asia (BCA).

Sebuah instansi pemerintah merupakan suatu organisasi yang beranggotakan sekumpulan orang yang ditunjuk dengan cara yang khusus untuk dapat menjalankan fungsi dari negara sebagai tatanan sebuah pelayanan publik atau public service. Instansi pemerintah merupakan segala yang meliputi instansi pemerintah yang memperjuangkan menjalankan dari fungsi pengelolaan pemerintahan yang berada di lingkungan eksekutif, baik yang berada di pusat maupun yang berada di daerah. Termasuk panitia, dewan, dan instansi yang menerima uang dari APBN atau APBD. Sedangkan berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 yang membahas tentang aparatur sipil negara atau ASN dalam pasal 1 nomor 15, instansi pemerintah merupakan sebuah instansi baik yang berada di

pusat maupun instansi yang berada di daerah. Dari kedua jenis instansi ini mempunyai fungsi sendiri setiap intansinya.

Instansi Pusat merupakan kementerian, forum pemerintah yang nonkementerian, sebuah kesekretariatan forum negara, dan kesekretariatan forum nonstruktural. Selain itu, Instansi suatu daerah merupakan komponen yang berada di wilayah provinsi dan komponen yang berada di wilayah kabupaten atau kota yang meliputi sekretariat yang berada di wilayah, sekretariat dpr wilayah, wilayah dinas, dan forum teknis wilayah. Instansi suatu pemerintah merupakan unsur pelaksana pemerintahan yang berada di sentra atau unsur pelaksana pemerintahan yang berada di wilayah. Bagian menurut instansi pemerintah merupakan kementerian yang berada di negara (pusat) atau forum dengan pemerintah yang berada di wilayah. Banyak masyarakat yang masih resah apakah badan usaha milik negara termasuk kedalam suatu instansi pemerintah atau tidak. Badan usaha milik negara adalah sebuah badan atau wadah bisnis yang semua atau sebagian akbar yang modal atau dananya dimiliki oleh negara dengan pengikutan melalui cara langsung, yang asal menurut kekuasaan sebuah negara yang dipisahkan. Sehingga badan usaha milik negara ini bukanlah pelaksana suatu pemerintahan, namun mempersoalkan pelaksana bisnis sebagai akibatnya tidak merupakan instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan menggunakan sebuah data kualitatif yang nantinya kemudian dikerjakan dan di selidiki dan juga ditelaah untuk dapat menarik sebuah kesimpulan. Metode deskriptif menurut Sugiyono merupakan sebuah metode yang dipakai untuk menjelaskan, menyelidiki ataupun mengkaji suatu hasil dari sebuah penelitian akan tetapi tidak untuk menarik sebuah kesimpulan yang dalam artian lebih luas. Selain itu, Sugiono juga mengatakan bahwasannya sebuah pendekatan kualitatif merupakan sebagai metode dari sebuah penelitian berdasarkan filosofi post-naturalisme digunakan untuk mempertimbangkan keadaan objek sebuah salam, dimana seorang peneliti sebagai unsur utama, teknik dari sebuah pengumpulan data adalah triangulasi, selanjutnya sanalisis sebuah data adalah induktif, atau temuan penelitian kualitatif dan kuantitatif lebih mengutamakan arti dari pada generalisasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengimplementasian dari penelitian ini dengan memakai metode atau secara deskriptif kualitatif dengan memiliki tujuan untuk mengutarakan fakta atau peristiwa, keadaan, kejadian atau fakta, dan variabel yang telah terjadi selama penelitian ini berjalan, menyajikan hasil penelitian dengan menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Kajian ini

menginterpretasikan dan mendeskripsikan data mengenai situasi saat ini dan kemudian selanjutnya membandingkan dengan sebuah peraturan yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data dengan melalui kegiatan studi pustaka. Data tersebut selanjutnya kemudian dianalisis melalui cara reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan sebuah kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Di Indonesia sendiri, Akuntansi Sektor Publik bisa diartikan sebagai metode teknik dan pengkajian akuntansi dalam penyelenggaraan dana warga oleh pemerintah pada pusat, lembaga tinggi suatu negara, departemen, badan layanan umum, pemerintah pada daerah, badan layanan umum di daerah, lembaga sosial masyarakat, yayasan sosial, dan juga dalam proyek kerjasama anatara organisasi sektor publik dengan organisasi swasta.(GUNAWAN, 2015)³

Di dalam akuntansi sektor public ini, informasi akuntansi akan digunakan untuk memberikan mengenai data tentang keadaan ekonomi dan juga keadaan keuangan di dalam sektor publik kepada pelaksana baik pelaksana eksekutif, pelaksana legislatif, pelaksana yudikatif, dan juga pelaksana publik.

Teori dan Standar Akuntansi Sektor Publik

Teori akuntansi ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan akuntansi keuangan, khususnya pelaporan sebuah keuangan kepada pihak ketiga. Teori akuntansi pada sektor publik ini tetap menjadi pertanyaan apakah teori pada akuntansi sektor publik benar-benar ada. Menurut beberapa ilmuwan, sektor swasta, di mana akuntansi tumbuh lebih cepat, masih bertanya-tanya apakah mereka memiliki sebuah teori akuntansi selama ini. Suatu teori harus dibantu dengan berbagai penelitian, yang mengandung hipotesis yang faktanya diuji. Teori ini mempunyai tiga ciri khusus yang dasar, yaitu (1) keahlian menjelaskan atau menjelaskan fakta yang ada (explainability), (2) prediktabilitas (kemampuan mengendalikan fenomena).(Santoso & Pambelum, 2008)⁴

Pada dasarnya kajian teori akuntansi memiliki tiga tujuan, yaitu untuk dapat mengerti pengimplementasian akuntansi saat ini, menganalisis kelebihan dan kekurangan dari sebuah pengimplementasian akuntansi saat ini, dan juga untuk membetulkan pengimplementasian akuntansi pada waktu yang akan datang. Mengembangkan teori sektor publik berfungsi untuk dapat meningkatkan praktik yang dilakukan saat ini. Yang terikat dengan usaha peningkatan dari

3

4

sebuah kualitas laporan keuangan yang menyediakan sebuah informasi keuangan yang sesuai dan andal. Untuk dapat mewujudkan sebuah laporan keuangan yang sesuai dan andal bagi sektor publik, akuntan sektor publik menghadapi sejumlah kendala. Hambatannya adalah objektivitas, konsistensi, keterbandingan, ketepatan waktu, keekonomian pelaporan, dan materialisme.

Objektivitas

Objektivitas merupakan sebuah halangan utama didalam penyusunan laporan pada keuangan yang sesuai. Laporan pada keuangan disajikan oleh sebuah manajemen agar dapat menjelaskan sebuah kinerja yang nantinya akan dapat diraih manajemen pada selama periode waktu tertentu kepada pihak luar yang merupakan pihak terkait organisasi. Sering terdapat banyaknya dampak masalah dengan objektivitas laporan laba rugi karena adanya dampak yang timbul dari sebuah kepentingan, terutama antara sebuah kepentingan sebuah manajemen dengan kepentingan sebuah stakeholders. Direksi tidak pasti bertindak untuk sebuah kepentingan para pemangku kepentingan, tetapi seringkali bertindak untuk bisa memaksimalkan sebuah kesejahteraan dan mengamankan posisi masing-masing, terlepas dari bahaya yang ditimbulkan kepada para pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, investor, kreditor, dan masyarakat.

Konsistensi

Sebuah konsisten akan dapat mengacu dalam pemakaian sebuah cara atau teknik dari akuntansi yang sama buat membuat laporan keuangan suatu organisasi yang selama pada beberapa kurun waktu tertentu, ketika dengan berturut-turut. Memiliki tujuan yaitu supaya laporan sebuah keuangan bisa diperbandingkan kemampuannya menurut dari tahun ke tahun yang akan datang. Konsisten dari sebuah penerapan pada metode akuntansi adalah hal yg sangat krusial lantaran organisasi memiliki sebuah tujuan yang jangka panjang, sedangkan dengan laporan keuangan yang hanya akan menyampaikan sebuah kinerja selama satu periode tertentu. Karenanya supaya ini terjadi prosedur penilaian kemampuan sebuah organisasi dari pihak eksternal, maka sebuah organisasi akan perlu lebih stabil pada mengimplementasikan metode akuntansinya.

Daya banding

Laporan pada keuangan sektor publik harus menimbang-nimbang antara periode dengan organisasi sejenis lainnya. Dengan brgitu, maka komparabilitas bermakna bahwa laporan keuangan bisa dipakai untuk membandingkan antara sebuah kemampuan suatu organisasi dengan suatu organisasi lainnya yang mungkin sebetulnya. Masalah kendala komparabilitas terikat dengan keobjektifan dikarenakan semakin rasional sebuah laporan keuangan tersebut, maka akan semakin banyak komparabilitas yang akan diberikan karena laporan yang berbeda dapat dihasilkan atas

dasar yang sama. Selanjutnya, komparabilitas juga dengan sebuah ketetapan. Dengan adanya beberapa pilihan lain metode sebuah akuntansi juga akan dapat mempersulit sebuah perbandingan. Tepat waktu

Laporan sebuah keuangan ini wajib di buat pada waktu yang tepat sehingga keputusan dari ekonomi, sosial dan juga politik dapat dibuat dan untuk meminimalisir keterlambatan dalam membuat sebuah keputusan tersebut. Kendala dalam waktu berhubungan dengan tenggat waktu pelaporan keuangan terbaik untuk penentuan sebuah keputusan. Masalahnya adalah semakin banyaknya suatu informasi yang dibutuhkan, maka akan semakin lama waktu yang akan dibutuhkan untuk menghasilkannya. Laporan keuangan dapat disajikan pada waktu yang tidak sesuai dengan pembuatan sebuah keputusan, bahkan jika disajikan dengan waktu yang lebih dahulu sekalipun.

Ekonomis dalam penyajian laporan

Pelaporan keuangan itu mahal. Semakin banyaknya sebuah informasi yang diminta, maka akan semakin tinggi biaya permintaan. Halangan ekonomi pada penyajian sebuah laporan keuangan mungkin lebih besar daripada manfaat dan biaya yang akan dipakai dalam penyusunan laporan.

Materialitas

Informasi juga dianggap penting jika dapat mengubah suatu keputusan, atau apabila jika dihapuskan akan mengarah pada keputusan lain. Menentukan materialitas tersebut memang merupakan pertimbangan subjektif, tetapi pertimbangan semacam itu tidak bisa turun ke preferensi pribadi. Pertimbangan yang digunakan adalah pertimbangan profesional berdasarkan teknik tertentu.

Standar akuntansi adalah panduan atau prinsip umum yang mengelola perbuatan sebuah akuntansi dalam perancangan dan penyajian laporan keuangan untuk dikomunikasikan pada pemakai laporan keuangan, selain itu, sedangkan suatu prosedur akuntansi adalah pelaksanaan khusus yang nantinya akan dipakai untuk menerapkan patokan tersebut. Untuk mengetahui kepatuhan dengan proses yang telah di tetapkan, sistem akuntansi sektor publik ini harus memiliki sistem pengawasan internal untuk pendapatan dan pengeluaran dari dana publik. Pengembangan patokan akuntansi sangat penting untuk memastikan ketetapan dari sebuah laporan keuangan. Kurangnya standar akuntansi yang mencukupi akan berdampak kurang baik pada berupa kurangnya tingkat keandalan dan keobjektifan dari penjelasan data yang akan disajikan, inkonsistensi di dalam laporan keuangan, dan kesulitan dalam audit.

Suatu proses pengembangan dan penerapan patokan akuntansi sektor publik adalah hal yang sangat penting bagi pekerjaan seorang akuntan, profesi akuntan dan juga para pihak yang memiliki sebuah kepentingan. Pengembangan standar ini bisa menguntungkan satu pihak tetapi juga bisa membuat rugi pihak lain. Penetapan proses terbaik untuk menentukan konsistensi dalam standar akuntansi yaitu faktor yang sangat penting dalam memastikan bahwa standar akuntansi bisa disetujui oleh pihak yang memiliki sebuah kepentingan dan juga dapat bermanfaat pada perkembangan organisasi akuntansi sektor publik.

Laporan Keuangan Sektor Publik, Tujuan dan Fungsinya

Pelaporan keuangan pada sektor publik merupakan sebuah elemen kunci dalam membuat akuntabilitas sektor publik. Permintaan akuntabilitas publik yang semakin meningkat berarti manajemen pada sektor publik harus menyediakan sebuah informasi yang diberikan kepada kalayak publik, yang mana salah satunya yaitu sebuah informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Namun, pelaporan keuangan bukanlah tujuan terakhir dari akuntansi pada sektor publik ini. Pada informasi keuangan digunakan sebagai sebuah dasar dalam penentuan keputusan. Informasi akuntansi adalah cara untuk akuntabilitas sektor publik yang baik, penentuan tujuan akhir untuk sektor publik. Apalagi akuntansi hanya diidentikkan dengan kinerja pertanggungjawaban keuangan. Ancaman yang harus dihadapi akuntan sektor publik yaitu apakah dapat memberikan informasi yang bisa dapat dipakai untuk memantau akuntabilitas dari sebuah manajemen, akuntabilitas politik, dan juga akuntabilitas politik atau tidak.

Sektor publik merupakan suatu organisasi yang sangat lengkap dan beraneka ragam. Kesulitan pada sektor publik berarti keperluan sebuah informasi untuk persiapan dan pengawasan manajemen akan semakin beragam. Begitu juga dengan pelaku sektor publik, akan memerlukan sebuah informasi yang lebih beragam, andal, dan lebih sesuai untuk mengambil sebuah keputusan. Selain itu, tugas dan juga sebuah tanggung jawab seorang akuntan sektor publik yaitu untuk menyajikan sebuah informasi untuk dapat mengisi sebuah kepentingan internal di dalam suatu organisasi maupun kepentingan eksternalnya.

Akuntansi sektor publik mempunyai kiprah primer buat menyediakan sebuah laporan keuangan menjadi keliru satu bentuk aplikasi akuntabilitas publik. Di dalam akuntansi dan laporan keuangan memuat definisi menjadi suatu prosedur penghimpunan, pengerjaan dan pendiskusian fakta yg berguna buat pembuatan sebuah keputusan dan buat menilai suatu kinerja pada sebuah organisasi. Lantaran keperluan sebuah fakta pada sektor publik yang lebih bermacam-macam, oleh karena itu faktanya hanya terbatas dalam fakta keuangan yg didapatkan dan sistem akuntansi pada

sebuah organisasi. Informasi non-moneter misalnya berukuran hasil pelayanan wajib juga ditinjau kembali pada suatu pembuatan sebuah keputusan.

Pada laporan sebuah keuangan sebuah organisasi sektor publik yang tentunya disusun dengan tujuan serta fungsi, dari laporan keuangan pada sektor publik yaitu Ketaatan dan Manajemen. Laporan keuangan dipakai untuk meyakinkan para pemakai sebuah laporan keuangan dan juga otoritas bila sebuah penyelenggaraan sumber daya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lainnya. Laporan keuangan digunakan untuk salah satu bentuk akuntabilitas publik. Pada laporan keuangan dipakai untuk memantau kinerja dan mengoreksi suatu manajemen, dapat memberikan kebenaran untuk mengawasi tren dari waktu ke waktu, sebuah perolehan tujuan yang sudah ditentukan, dan membandingkannya dengan sebuah kinerja suatu organisasi serupa lainnya apabila ada. Pelaporan keuangan ini juga memungkinkan pihak ketiga untuk mendapatkan sebuah informasi tentang dana belanja barang dan jasa yang didapatkan, dan memungkinkannya untuk menafsirkan efisiensi dan efektivitas pemakaian sumber daya dalam sebuah organisasi, melalui informasi tentang rencana dan otorisasi. Sebuah laporan keuangan merupakan dasar untuk merencanakan prosedur dan kegiatan di masa depan. Laporan keuangan digunakan untuk meneruskan informasi tambahan mengenai sebuah penggunaan dana yang sah, perkembangan dari hidup organisasi.

Laporan suatu keuangan digunakan untuk meringankan para pembaca di dalam mengambil keputusan apakah suatu organisasi atau entitas bisa terus mengadakan barang dan jasa di masa yang akan datang atau tidak. Fungsi laporan keuangan adalah untuk meneruskan kemungkinan bagi organisasi untuk menyajikan laporan kinerja kepada pengguna yang terkena dampak oleh karyawan dan juga masyarakat. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai sebuah alat komunikasi kepada publik dan pihak yang memiliki kepentingan lainnya dengan sumber data dan metrik. Laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan sebuah informasi kepada berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang ingin memahami lebih banyak tentang organisasi.

Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik, Peranan dan Kepentingannya

Ada beberapa kelompok pengguna laporan keuangan. Beberapa kelompok pengguna laporan keuangan yaitu wajib pajak, emiten, investor, penerima jasa berbayar, pegawai, penyelenggara, DPRD, pengurus, pemilih, dan badan pengelola (badan administrasi).

Laporan keuangan dapat disusun dan dibuat untuk dapat memberikan sebuah informasi yang benar dan relevan tentang posisi suatu keuangan serta seluruh transaksi entitas pelapor pada selama periode tertentu pelaporan. Laporan keuangan lebih dipakai untuk membandingkan kinerja perolehan, pengeluaran, transfer dan pembelanjaan dengan rencana keuangan yang sudah

ditentukan, memperkirakan posisi keuangan, menganalisis efektivitas dan efisiensi entitas, melaporkan dan untuk membantu memastikan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Pada setiap entitas pelapor berkewajiban untuk menyampaikan upaya yang dicapai dan hasil yang dapat dicapai dalam melaksanakan kegiatannya secara terstruktur selama kurun waktu pelaporan tersebut untuk sebuah keperluan

Akuntabilitas sebuah penyelenggaraan dari sumber daya dan penerapan sebuah keputusan yang diserahkan kepada suatu entitas pelapor dalam rangka untuk meraih suatu tujuan yang mana telah ditentukan dengan cara berkala, Pedoman untuk dapat membantu para pengguna dalam menganalisis kinerja dari kegiatan para entitas pelapor selama periode pemberitahuan untuk memudahkan sebuah persiapan, penyelenggaraan, dan juga pengawasan fungsi semua aset, keharusan dan ekuitas dana publik karena manfaat masyarakat. dalam penyelenggaraan sumber daya yang dipercayakan dan kepatuhannya terhadap undang-undang dan peraturan, Keadilan Antargenerasi untuk membantu pemakai mengetahui kelengkapan pendapatan dari pemerintah selama suatu periode referensi untuk mendanai semua pembiayaan yang didistribusikan dan juga apakah jatah masa depan dapat dikatakan untuk berbagi beban biaya ini.

Kelebihan Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintah

Manfaat akuntansi sektor publik memanglah sangat penting dalam menyiapkan sebuah laporan keuangan dengan klasifikasi akun standar, prosedur suatu pencatatan serta penjurnalan yang sesuai dengan peredaran bisnis organisasi sektor publik termasuk pentafsiran, perbendaharaan dan laporan akuntansi. Standar yang dimiliki oleh akuntansi keuangan sektor publik telah diciptakan dan dikembangkan dengan sesuai menurut standar yang diterima dengan cara internasional untuk mencapai fungsionalitas akuntansi yang stabil dan sebanding untuk semua negara atau yurisdiksi. Di bawah ini adalah beberapa manfaat dari akuntansi sektor publik:

Menyajikan Laporan Akuntansi yang Berkualitas

Manfaat akuntansi sektor publik bisa menambahkan sebuah tingkatd kualitas dan keandalan dalam laporan akuntansi dengan bertautan pada keuangan organisasi pada sektor publik atau entitas pemerintah. Laporan keuangan yang diutarakan harus yang bermutu tinggi dan rapi dikarenakan melibatkan akuntabilitas kepada pemerintah yang ada di daerah pusat dan juga publik. Proses akuntan publik ini diharuskan menyediakan sebuah data dan laporan yang nantinya dapat dibaca oleh publik dengan cara yang mudah dipahami.

Memperbaiki Kinerja Keuangan dan Perekonomian

Keistimewaan atau ciri khusus dari suatu organisasi sektor public ini harus mampu menyiapkan laporan keuangan dengan baik guna meningkatkan sebuah kinerja sebuah keuangan di suatu daerah dan selain itu juga pada suatu negara secara umum. Laporan keuangan yang bagus juga mendorong sebuah transparansi yang nantinya dapat diketahui bahwa suatu keadaan perekonomian nasional. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP) mengarah pada sistem akuntansi pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang lebih bagus dan sempurna sehingga nantinya laporan keuangan yang didapatkan dapat memberikan sebuah informasi yang baik dan transparan. Perencanaan dan pentafsiran juga akan menjadi lebih andal karena sama efektif dalam mengelola sumber daya serta juga sebuah kewajiban ekonomi.

Pemerintah Lebih Fokus pada Bidangnyanya

Pemerintah yang sebagai pelaksana tentu lebih baik mengarahkan dari pada memanipulasi sistem pengendalian manajemen pada sektor publik. Pemerintah dan juga birokrasinya harus melepaskan suatu bidang pekerjaan yang mana sudah bisa dilakukan masyarakat umum. Dengan dilepaskannya domain-domain itu, maka organisasi atau instansi pemerintah harus lebih fokus mengelola bidang-bidang tertentu terkait dengan mengenai hajat kelangsungan hidup banyak orang.

Membuat Masyarakat Lebih Mandiri

Pemerintah wajib memperkuat dari pada melayani rakyat. Pemerintah dipilih sang rakyat namun ketika ini wajib menciptakan rakyat sanggup berbuat atau berdikari. Dengan sebuah transparansi syarat keuangan yg tersaji membuat rakyat lebih tergerak buat menyelesaikan masalahnya dengan cara berdikari dari pada dengan hanya bergantung kepada pemerintah.

Menjadi Lebih Kompetitif

Di era keuniversalan atau modern ini harus dapat menjadikan pemerintah lebih baik dan kompetitif. Dengan cara adalah menanamkan jiwa kompetitif dalam birokrasi. Dengan menggunakan akuntansi sektor publik, tuntutan, dan termasuk juga pegawai pemerintah, menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan sifat akuntansi dikarenakan mereka ingin bersaing lintas departemen. Organisasi yang ada di sektor publik harus mendukung dan membuat peraturan serta menyiapkan barang untuk kebutuhan yang diperlukan oleh publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Indonesia, akuntansi pada sektor publik bisa diartikan sebagai teknis dan analitis akuntansi penyelenggara dana publik pada pemerintah yang ada di daerah pemerintah pusat, Lembaga yang bertugas sebagai penyelenggara tinggi suatu negara, kementerian dan lembaga, pelayanan publik,

pemerintah suatu daerah, lembaga pelayanan public yang ada di daerah, organisasi sosial dan lembaga sosial, serta rencana kolaborasi organisasi sektor publik dan juga sektor swasta. Teori dari akuntansi ini memiliki suatu hubungan yang sangat dekat dengan akuntansi keuangan, khususnya pelaporan pada keuangan ke bidang ketiga. Teori dari akuntansi ini mempunyai tiga keistimewaan yang mendasar, yaitu: (1) keahlian menjelaskan kejadian yang ada (explainability), (2) prediktabilitas (kemampuan mengendalikan fenomena).

Untuk mendapatkan laporan keuangan yang sesuai dan baik bagi sektor publik, akuntan sektor publik menghadapi sejumlah kendala. Hambatannya adalah objektivitas, konsistensi, keterbandingan, ketepatan waktu, keekonomian pelaporan, dan materialisme. Pelaporan keuangan sektor publik merupakan elemen kunci dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Laporan keuangan organisasi sektor publik disusun untuk suatu tujuan dan fungsi. Secara umum, tujuan dan fungsi pelaporan keuangan sektor publik adalah: Ketaatan dan Manajemen. Laporan keuangan dipakai untuk meyakinkan pemakai laporan keuangan dan pengaruh apabila penyelenggaraan sumber daya yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lainnya. Laporan keuangan dipakai untuk bentuk akuntabilitas publik.

Pelaporan keuangan dirangkai buat mempersiapkan liputan yg sesuai tentang letak keuangan dan semua transaksi yg dilaksanakan oleh suatu pemberitahuan untuk satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan antara kinerja pendapatan, pengeluaran, transfer dan pembiayaan menurut aturan yang telah ditentukan dan dipakai, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, entitas pelapor dan untuk membantu menentukan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap dari entitas suatu pelaporan memiliki kepatuhan buat menyampaikan cara-caraa yang sudah dilaksanakan dan output yg didapat pada aplikasi aktivitas dengan sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan buat suatu keperluan.

Manfaat akuntansi sektor publik memang sangat penting dalam menyajikan pelaporan keuangan dengan menggunakan klasifikasi akun standar, prosedur dan proses pencatata serta penjurnalan dengan sesuai dengan arus atau alur bisnis organisasi sektor publik termasuk penganggaran, perbendaharaan dan laporan akuntansi. Keunggulan akuntansi sektor publik adalah: Menyajikan laporan akuntansi yang berkualitas, meningkatkan kinerja keuangan dan ekonomi, pemerintah lebih fokus pada sektornya sendiri, membuat masyarakat lebih mandiri dan menjadi lebih kompetitif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, akuntansi sektor publik sangat penting untuk diterapkan karena pelaksanaan dari akuntansi sektor publik memiliki banyak dampak positif terutama mengenai kualitas laporan keuangan, menunjukkan bahwa semakin tinggi pelaksanaan dari akuntansi sektor publik, semakin baik kualitas akuntansi sektor publik. laporan keuangan. Oleh karena itu kami mengharapkan akuntansi sektor publik dapat dilakukan di semua instansi pemerintah, bahkan sampai instansi pemerintah tingkat desa. Dan kami berharap pelaksanaannya lebih transparan sehingga tidak ada kecurangan atau tindakan yang dapat merugikan negara sehingga Indonesia menjadi negara yang sejahtera, maju dan maju.

DAFTAR PUSTAKA

Chandra, M. A. (2019). *Implementasi Akuntansi Sektor Publik Untuk Institusi (Studi Kasus Pada Politeknik Pariwisata Makassar)*. 98.

GUNAWAN, H. (2015). Akuntansi Sektor Publik (Anggaran Sektor Publik). *Yogyakarta: Andi*, 25.
http://www.academia.edu/download/54793453/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Dana_Umum_Genera.docx

Marlina Wati. (2015). PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG. *Nhk 技研*, 151, 10-17. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>

Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis Unpar*, 4(1), 14-33. <https://doi.org/10.26593/jab.v4i1.363>.